

2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan

UPT. RSUD KH. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021-2026



2021-2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021- 2026 dapat terselesaikan. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan urusan Kesehatan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Untuk penyelesaian penyusunan dokumennya, kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak atas terselesaikannya Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang tanpanya, niscaya dokumen ini tak akan selesai sesuai jadwal dan selengkap ini. Semoga atas bantuannya ini dapat menjadikan dokumen-dokumen semacamnya menjadi lebih sempurna dan tepat guna dan diharapkan dokumen Renstra Kesehatan Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan di sektor Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terarah.

Benteng, 03 Juni 2021

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. H. Husaini, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .	33
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	34
3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra	35
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	37
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Error! Bookmark not defined.
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN	Error! Bookmark not defined.
BAB VIII. PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu-isu yang masih belum terselesaikan seperti masih tingginya kematian ibu dan kematian bayi, permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (*stunting*), beban ganda penyakit dimana penyakit menular masih muncul sedangkan tidak menular semakin meningkat, belum optimalnya upaya *promotif* dan *preventif*, serta rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perlunya disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Kesehatan telah menetapkan RPJMN dan Renstra tahun 2020 – 2024 yang merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan bidang Kesehatan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020 -2024 akan mempengaruhi capaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara yang berpenghasilan menengah keatas yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan periode akhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 -2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target – target tersebut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya ditampung dalam tujuh agenda pembangunan.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur khususnya bidang kesehatan ditandai dengan;

1. Terjaminnya keamanan kesehatan Negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, respon terhadap ancaman global.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga Negara terhadap lembaga jaminan social yang menyeluruh.
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dan Healthy adjusted life expectancy (HALE).

Rencana strategis (Renstra) berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan, sebagai dasar [penilaian kerja pimpinan organisasi perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

I.2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pembanguana kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagaimana berikut ;

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang _ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- 1.1. Merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun rencana kerja lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026
- 1.2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tujuan

- 2.1. Merupakan dokumen yang dapat di gunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan.
- 2.2. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 2.3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi, monitoring evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu kegiatan internal maupun eksternal.
- 2.4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kesehatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Kebijakan yang mengatur tentang Perangkat Daerah, Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

Dinas Kesehatan Dipimpin Oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

➤ Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi ;

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- Pelaksanaan administrasi Dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas di dukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari ;

1. Sekretaris, dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan Program dan Pelaporan, Umum, Hukum dan Kepegawaian, serta Keuangan dalam lingkup Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya fungsi sekretaris adalah ;

- Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
- Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.

- Apengordinasian urusan umum, hokum, dan kepegawaian.
 - Pengordinasian pengelolaan keuangan ; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Memiliki Fungsi ;
- Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat.
 - Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi ;
- Perumusan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - Pelaksanaan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - Pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan rujukan, serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.

Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah ;

- Perumusan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi ;

- Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

➤ Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari ;

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

- Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kesehatan masyarakat

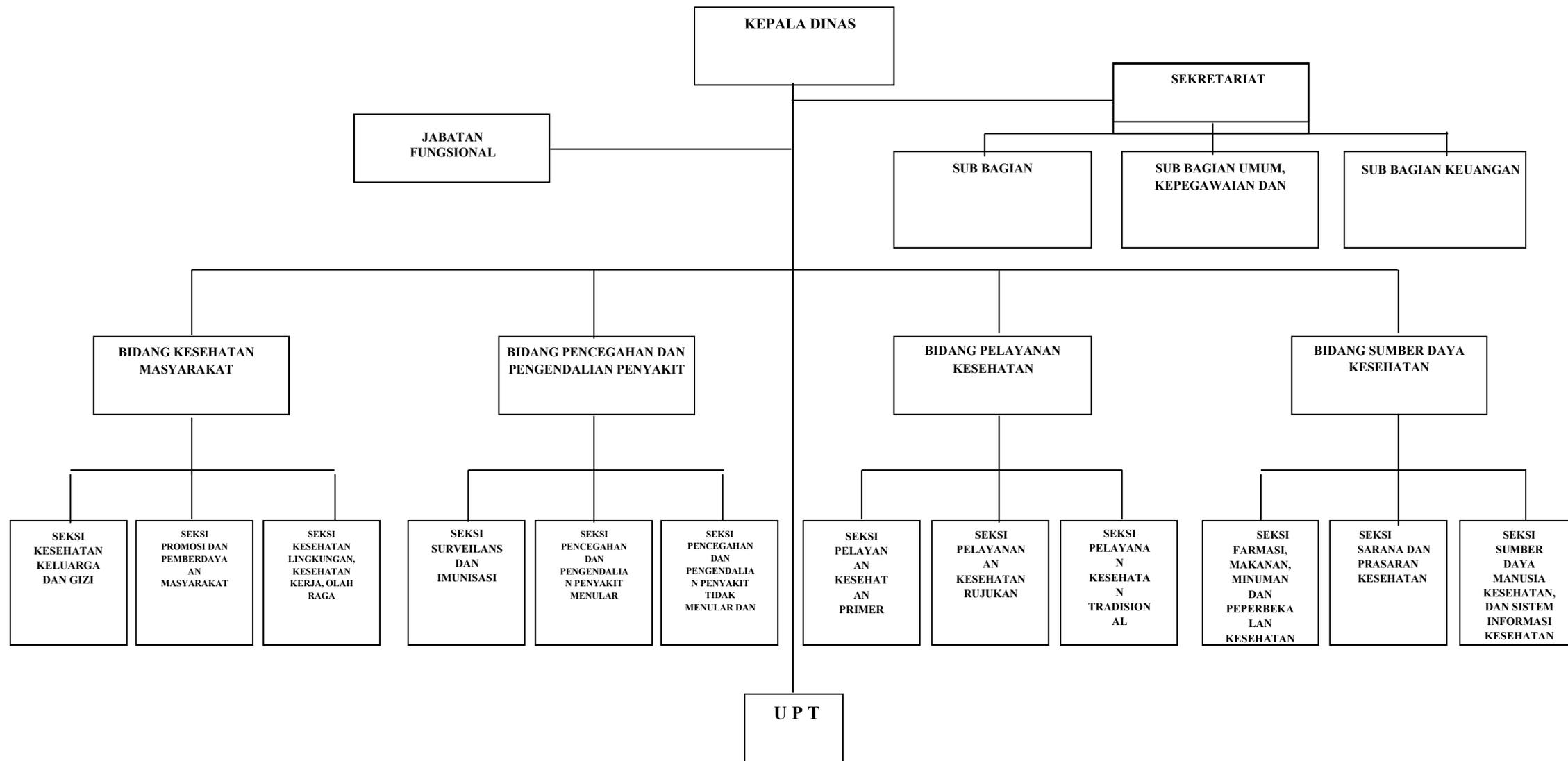
- Seksi Kesehatan keluarga dan gizi.
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

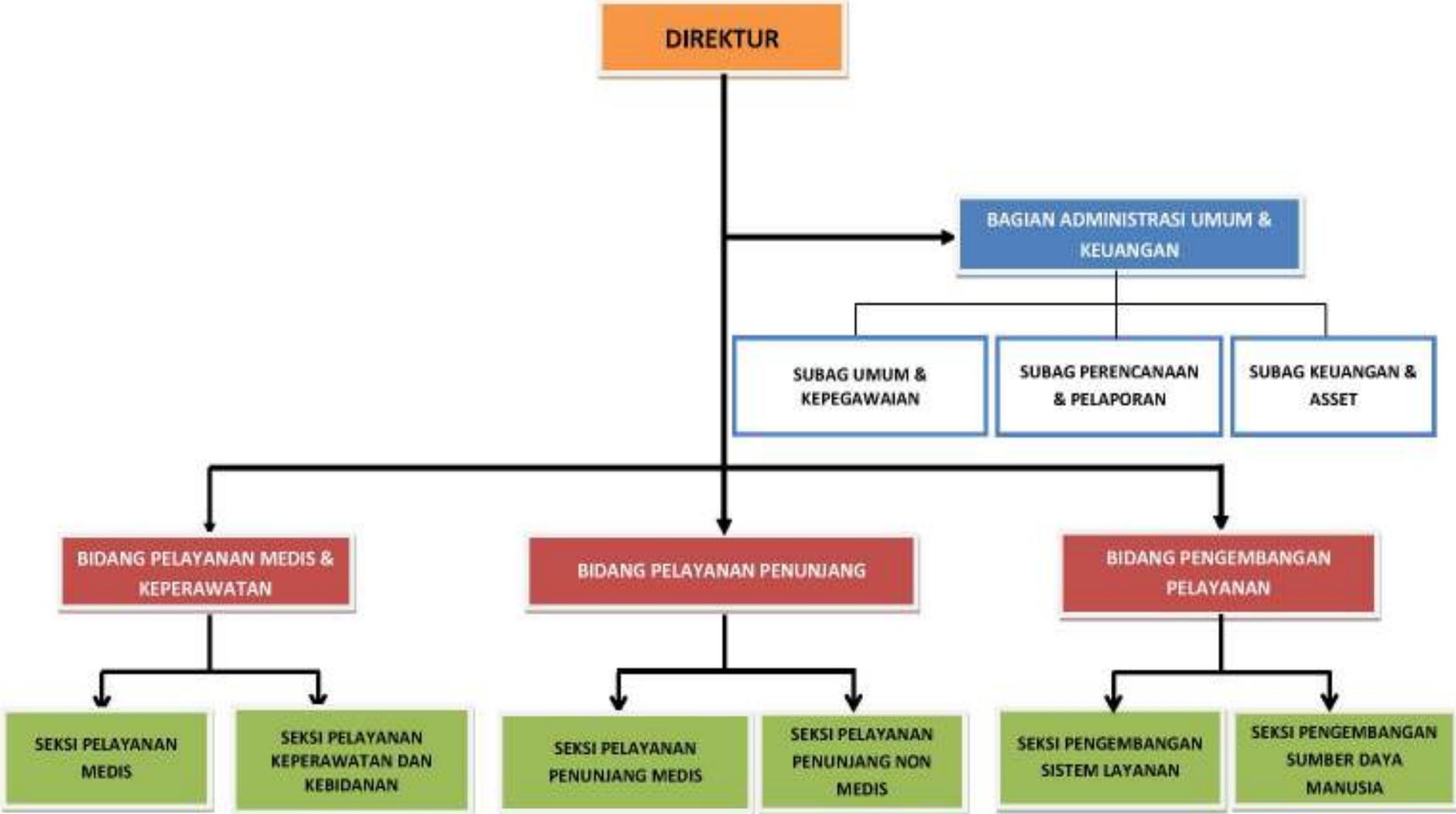
- Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular.
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - Seksi Pelayanan Kesehatan tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
 - Seksi Sarana dan prasarana Kesehatan.
 - Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Kesehatan.
- g. Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Tekhnis
- a. RSUD K.H Hayyung
 - b. RSP Pratama Jampea
 - c. UPTD Puskesmas Parangia
 - d. UPTD Puskesmas Bontomatene
 - e. UPTD Puskesmas Polebunging
 - f. UPTD Puskesmas Barugaia
 - g. UPTD Puskesmas Benteng
 - h. UPTD Puskesmas Bontoharu
 - i. UPTD Puskesmas Bontosunggu
 - j. UPTD Puskesmas Bontosikuyu
 - k. UPTD Puskesmas Lowa
 - l. UPTD Puskesmas Pasilambena
 - m. UPTD Puskesmas Pasimarannu

- n. UPTD Puskesmas Pasimasunggu
- o. UPTD Puskesmas Rajuni
- p. UPTD Puskesmas Ujung Jampea
- q. UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Kepulauan Selayar

BAGAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG



II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan adalah ;

a. Jumlah Pegawai menurut jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	14
3	Eselon IV	47
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	465
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	38
	Jumlah	550

b. Jumlah Pegawai Menurut Jurusan / Keahlian

Daftar Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	%
1.	Dokter Spesialis	9	0,6
2.	Dokter Umum	39	2,5
3.	Dokter Gigi	9	0,6
4.	Perawat	506	32,4
5.	Bidan	641	41,4
6.	Kesehatan Masyarakat	59	3,8
7.	Kesehatan Lingkungan	31	2,0
8.	Kefarmasian	37	2,4
9.	Apoteker	29	1,9
10.	Laboratorium	51	3,3

11.	Teknisi Medis	29	1,9
12.	Tenaga Penunjang	120	7,7
Total		1.560	

Pada tahun 2020, total SDM Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.560 orang baik ASN, PPT dan Tenaga kontrak lainnya, terdiri dari 9 Dokter spesialis (0,6%), 39 Dokter Umum (2,5%), 9 Dokter Gigi (0,6%), 506 Perawat (32,4%), 641 Bidan (41,4%), 59 Tenaga Kesehatan Masyarakat (3,8%), 31 Tenaga Kesehatan Lingkungan (2,0%), 37 Tenaga Kefarmasian (2,4%), 29 Tenaga Apoteker (1,9%), 51 Tenaga Laboratorium (3,3%), 29 Teknisi Medis (1,9%), dan 120 Tenaga Penunjang (7,7%).

a. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No.	Tenaga Kesehatan	jumlah	%
1.	Dokter	25	2,0
2.	Dokter Gigi	14	1,1
3.	Bidan	542	43,6
4.	Perawat	337	27,1
5.	Kesehatan Masyarakat	51	4,1
6.	Kesehatan Lingkungan	32	2,6
7.	Laboratorium	21	1,7
8.	Kefarmasian	38	3,1
9.	Gizi	36	2,9
10.	Teknisi Penunjang	149	11,8
Total :		1.243	

Total tenaga kesehatan di Puskesmas sebanyak 1.243 orang yang terdiri dari 25 orang tenaga dokter (2,0 %), 14 dokter gigi (1,1 %), 542 orang tenaga bidan (43,6 %), tenaga keperawatan 337 orang (27,1%), 51 orang tenaga kesehatan masyarakat (4,1 %), 32 orang tenaga kesling (2,6 %), 21 orang tenaga Lab (1,7%), 38 tenaga kefarmasian (3,1%), 36 orang Gizi (2,9%), dan tenaga penunjang 149 orang (11,8%).

b. Kecukupan Dokter di Puskmesmas

Puskesmas Benteng pada tahun 2020 memiliki 4 tenaga Dokter dan sudah memenuhi standar. Puskesmas Bontosunggu, Bontomatene, Barugaia, Benteng, Jampea, Buki, Pasi Marannu, Pasi Lambena, dan Puskesmas Ujung Jampea masing-masing 2 tenaga dokter pada tahun 2020. Selebihnya itu masih ada 5 Puskesmas yang belum mempunyai 1 Tenaga Dokter yaitu Puskesmas Parangia, Polebungin, Bontosikuyu, Lowa, dan Pasi tallu. Jadi masih ada 13 Puskesmas yang belum memenuhi standar.

c. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas minimal 1 Orang, baik di Puskesmas rawat inap dan non inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 terdapat 2 Puskesmas yang memiliki masing-masing 2 Dokter Gigi yaitu Puskesmas Benteng dan Puskesmas Parangia, sedangkan 8 Puskesmas masing-masing 1 Dokter Gigi yaitu Puskesmas Bontosunggu, Bontomatene, Barugaia, Polebungin, Bontosikuyu, Lowa, Buki, dan Puskesmas Pasitallu. Sedangkan Puskesmas yang belum memiliki dokter Gigi pada tahun 2020 sebanyak 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Benteng Jampea, Pasilambena, Pasimarannu, dan Puskesmas Ujung Jampea.

d. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah 5 orang sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah 8 orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020, semua Puskesmas memiliki jumlah tenaga perawat lebih dari standar yang ditetapkan, proporsi terbesar Puskesmas dengan jumlah perawat berlebih terdapat pada Puskesmas Bontosunggu 41 orang dan Puskesmas Barugaia sebanyak 39 orang tenaga perawat. Proporsi terkecil yakni pada Puskesmas Lowa 4 orang tenaga perawat.

e. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah Bidan di Puskesmas non rawat inap 4 orang dan di Puskesmas rawat inap minimal 7 orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ketersediaan Bidan pada Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

2020, semua Puskesmas telah memenuhi syarat ketersediaan tenaga Bidan dengan proporsi terbesar yakni pada Puskesmas Bontosunggu dan Pasitallu masing-masing 53 Tenaga. Puskesmas Barugaia sebanyak 52 tenaga Bidan. Adapun proporsi terkecil yakni pada Puskesmas Bontosikuyu sebanyak 12 tenaga Bidan.

f. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

No.	Tenaga Kesehatan	jumlah	%
1.	Dokter Spesialis	8	5,2
2.	Dokter	11	7,1
3.	Dokter Gigi	1	0,6
4.	Perawat	72	46,8
5.	Bidan	25	16,2
6.	Kesehatan Masyarakat	12	7,8
7.	Kesehatan Lingkungan	1	0,6
8.	Kefarmasian	7	4,5
9.	Tenaga Penunjang	17	11,0
Total : 154			

Total SDM di Rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 154 orang terdiri dari 8 dokter spesialis (5,2%), 11 orang tenaga Dokter (7,1%), 1 orang tenaga Dokter Gigi (0,6%), 72 orang tenaga Perawat (46,8%), 25 orang tenaga Bidan (16,2%), 7 Tenaga Kefarmasian (4,5%), 12 orang tenaga Kesehatan Masyarakat (7,8%), 1 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan (0,6%), dan tenaga penunjang 17 orang (11,0%).

2.2.2. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

No.	Tenaga Kesehatan	jumlah
1.	Dokter Umum	1
2.	Bidan	78
3.	Perawat	123
4.	Kesehatan Masyarakat	2

5.	Kesehatan Lingkungan	2
6.	Kefarmasian	11
7.	Tenaga Penunjang	22
Total : 239		

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 telah mengangkat 239 orang status PTT yang ditugaskan di Kab. Kepulauan Selayar. Dokter umum sebanyak 1 orang, Bidan sebanyak 78 orang, Perawat sebanyak 123 orang, Kesehatan Masyarakat 2 orang, Kesehatan Lingkungan 2 orang, kefarmasian 11 orang, dan Tenaga penunjang medis 22 orang.

Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya, adalah :

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan rumah Negara tanpa golongan	Baik			8
2.	Tanah Bangunan gudang	Baik			10
3.	Tanah bangunan kantor pemerintah	Baik			2
4.	Tanah bangunan pendidikan dan pelatihan	Baik			1
5.	Tanah bangunan puskesmas / Posyandu	Baik			61
6.	Forklift	Baik			1
7.	Portable water pump	Baik			2
8.	station wagon	Baik			2
9.	Bus	Baik			1
10.	Mini Bus	Baik			6
11.	Pick Up	Baik			1
12.	Sepeda Motor	Baik			202
13.	Mobil Ambulance	Baik			31
14.	Gerobak Dorong	Baik			1
15.	Kapal Motor	Baik			10
16.	Mesin Kompresor	Baik			3
17.	Mesin Dinamo Kron	Baik			2
18.	Bak Air	Baik			3
19.	Ukuran Tinggi Orang	Baik			17
20.	Mesin Ketik Manual Standar	Baik			11
21.	Mesin Hitung Elektronik	Baik			2
22.	Lemari Besi	Baik			169

23.	Lemari Kayu	Baik		73
24.	Rak Besi	Baik		9
25.	Rak Kayu	Baik		50
26.	Fling Kabinet Besi	Baik		3
27.	Brandkas	Baik		16
28.	Lemari Kaca	Baik		10
29.	Lemari Makan	Baik		1
30.	CCTV	Baik		1
31.	Papan Nama	Baik		17
32.	White Board	Baik		1
33.	Mesin Absensi	Baik		1
34.	Overhead Projektor	Baik		8
35.	Display	Baik		1
36.	Alarm Indikator	Baik		1
37.	Papan Nama Instansi	Baik		25
38.	Papan Pengumuman	Baik		8
39.	Alat Kantor Lainnya	Baik		19
40.	Meja Kerja Besi	Baik		23
41.	Meja Kerja Kayu	Baik		64
42.	Kursi Kayu	Baik		324
43.	Meja Rapat	Baik		31
44.	Tempat Tidur Besi	Baik		6
45.	Tempat Tidur Kayu	Baik		12
46.	Meja Ketik	Baik		22
47.	Meja Resepsionis	Baik		2
48.	Meja Tambahan	Baik		7
49.	Meja Panjang	Baik		4
50.	Meja Obat	Baik		1
51.	Meja ½ Biro	Baik		175
52.	Spring Bed	Baik		2
53.	Kursi Rapat	Baik		72
54.	Kursi Tamu	Baik		70
55.	Kursi Putar	Baik		31
56.	Kursi Biasa	Baik		22
57.	Bangku Tunggu	Baik		7
58.	Kursi Lipat	Baik		1
59.	Meja Komputer	Baik		11
60.	Sofa	Baik		14
61.	Meubeleur Lainnya	Baik		32
62.	Jam Mekanis	Baik		2
63.	Jam Elektronik	Baik		6
64.	Mesin Pemotong Rumput	Baik		1
65.	Mesin Cuci	Baik		1
66.	Lemari ES	Baik		15
67.	A.C Window	Baik		102
68.	Kipas Angin	Baik		105
69.	Cold Storage	Baik		10
70.	Alat Pendingin Lainnya	Baik		4
71.	Komprom Gas	Baik		2
72.	Komprom Minyak	Baik		1
73.	Rice Cooker	Baik		6
74.	Radio	Baik		4
75.	TV	Baik		50

76.	Amplifer	Baik		9
77.	Loudspeker	Baik		7
78.	Sound System	Baik		14
79.	Wireless	Baik		3
80.	MegaPhone	Baik		7
81.	Microphone	Baik		10
82.	Unit Power Supply	Baik		5
83.	Tustel	Baik		4
84.	Timbangan Orang	Baik		30
85.	Tangga Aluminium	Baik		2
86.	Dispenser	Baik		6
87.	Alat Pemanas Ruangan	Baik		1
88.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik		220
89.	Alat Pemadam	Baik		10
90.	Alat Pembantu Kebakaran	Baik		16
91.	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati	Baik		13
92.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik		58
93.	Kursi Meja Pejabat Lainnya	Baik		38
94.	Camera Elektronik	Baik		7
95.	Layar Film	Baik		19
96.	Telephone	Baik		2
97.	Pesawat Telephone	Baik		4
98.	Telephone Mobile	Baik		7
99.	Hand Talky	Baik		6
100.	Antene SHF Transportable	Baik		6
101.	Genset	Baik		19
102.	Sterilisato	Baik		16
103.	Diagnostik Set	Baik		18
104.	Stetoskop Set	Baik		300
105.	Tensimeter	Baik		300
106.	Head Lamp	Baik		24
107.	Waskom	Baik		68
108.	Timbangan Badan	Baik		60
109.	Timbangan Bayi	Baik		60
110.	Kocher	Baik		28
111.	Tempat Tidur	Baik		350
112.	Metal Chatheete	Baik		6
113.	Anaromische Pinse	Baik		80
Total				67.801

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 yang berkaitan dengan kesehatan adalah “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Indikator kinerja tujuan pembangunan tersebut berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun Kinerja

pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang mendukung terhadap tujuan tersebut adalah Angka Harapan Hidup, Rasio kematian bayi, Rasio kematian ibu, Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan kesehatan dasar, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio dokter per satuan penduduk, rasio paramedis per satuan penduduk, Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan Rasio Posyandu.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup (AHH) memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan.

Untuk dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi, serta pendidikan. Indikator Angka Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survey atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Selayar

Tahun	Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan/ Penurunan	Naik/Turun
2016	67,76 tahun		-
2017	67,82 tahun	0,06 tahun	Naik
2018	68,03 tahun	0,21 tahun	Naik
2019	68,34 tahun	0,31 tahun	Naik
2020	68,46 tahun	0,12 tahun	Naik

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat banyak hal yang mempengaruhi angka harapan hidup berdasarkan jumlah bayi lahir dan meninggal dalam periode tertentu. Berikut beberapa faktor di antaranya adalah:

- Harapan subjektif: keinginan yang dimiliki seseorang terhadap panjang usianya sendiri.
- Demografi: terdiri dari jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang dimaksud adalah catatan seseorang apakah ia pernah terkena salah satu dari penyakit berat, seperti hipertensi, osteoarthritis, TBC, asma, diabetes, kanker, depresi, sirosis hati, maupun gagal ginjal.
- Sosio-ekonomi: termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal (mengontrak atau rumah sendiri), dan asuransi.
- Gaya hidup: misalnya merokok, konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga atau tidak.
- Psikososial: menggambarkan kondisi mental seseorang, apakah ia merasa depresi, seberapa sering ia memiliki *quality time*, dan lain-lain.

Beberapa kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain berupa sosialisasi penerapan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan erolahraga rutin.

b. Angka Kematian Bayi

No	Kecamatan	Tahun
----	-----------	-------

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	2	1	1	0	1
2	Pasilambena	2	0	2	1	1
3	Pasimasunggu	1	0	0	1	0
4	Taka bonerate	3	2	0	0	1
5	Pasimasunggu Timur	2	1	1	3	2
6	Bontosikuyu	1	3	1	1	1
7	Bontoharu	3	1	0	0	1
8	Benteng	2	2	2	2	1
9	Bontomanai	1	0	0	1	0
10	Bontomatene	2	1	1	0	1
11	Buki	0	1	0	2	0
Jumlah		19	11	8	11	9
Angka Kematian Bayi		10,02	5,75	3,95	5,62	3,70

Satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

c. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita sendiri memiliki arti jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ; Kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, dan kecelakaan – kecelakaan lain.

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	0	1	1	0
2	Pasilambena	1	0	0	0	1
3	Pasimasunggu	0	2	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	1	0	0
5	Pasimasunggu Timur	0	1	0	0	1
6	Bontosikuyu	2	0	0	1	0
7	Bontoharu	0	0	0	0	0
8	Benteng	0	1	0	0	1
9	Bontomanai	0	0	0	0	1
10	Bontomatene	0	0	0	0	0
11	Buki	0	1	1	0	1
	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran hidup	9,937	5,759	4,244	5,629	4,545

d. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	1	0	0	2	0
2	Pasilambena	0	1	0	1	0
3	Pasimasunggu	0	0	2	0	2
4	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5	Pasimasunggu Timur	1	0	1	0	0
6	Bontosikuyu	0	2	0	3	1
7	Bontoharu	3	0	0	0	0
8	Benteng	0	0	3	0	2
9	Bontomanai	1	0	0	1	0
10	Bontomatene	0	0	0	1	0
11	Buki	0	1	1	0	1

Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	9,937	5,759	4,244	5,629	4,545
---	-------	-------	-------	-------	-------

Dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah upaya preventif, antara lain melaksanakan sweeping ibu hamil, peningkatan pelayanan melalui kunjungan petugas kebidanan ke keluarga balita, serta peningkatan keterampilan keluarga dalam merawat dan mengasuh anak.

e. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas disetiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator yang sangat penting. Beberapa faktor yang menjadi penyebab angka kematian ibu ialah ; Peningkatan kualitas pelayanan pemantauan resiko tinggi belum maksimal, kondisi geografis sebagai Kabupaten kepulauan yang tidak mendukung saat terjadi kasus emergensi yang segera harus dirujuk pada saat persalinan, asupan nutrisi masa kehamilan yang tidak tercukupi sehingga terjadi komplikasi pada Ibu Hamil misalnya Anemia dan Hipertensi.

Tabel Angka Kematian di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0	1	0	1	0
2	Pasilambena	1	0	0	1	0
3	Pasimasunggu	0	1	0	0	0
4	Taka bonerate	0	0	0	1	0
5	Pasimasunggu Timur	2	0	0	0	2
6	Bontosikuyu	0	0	1	0	1
7	Bontoharu	0	0	0	2	0
8	Benteng	1	0	0	1	0
9	Bontomanai	0	1	1	0	1
10	Bontomatene	1	0	0	1	0
11	Buki	1	0	0	0	0
	Jumlah	6	3	2	5	7

	Angka Kematian Ibu	313,8	157,06	98,81	255,8	324,2
--	---------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

f. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indicator ini menunjukkan ketersediaan posyandu untuk melayani balita dalam satu wilayah pemukiman. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Rasio Posyandu per satuan balita rata-rata sebesar 1:15

Tabel Rasio Posyandu per satuan Balita Kabupaten Selayar

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu (buah)	300	302	305	305	307
2	Jumlah Balita	1.912	1.910	1.885	1.954	1.980
3	Rasio Posyandu persatuan balita	1:15	1:15	1:16	1:15	1:15

g. Rasio Puskesmas, Pustu, poliklinik, persatuan penduduk

Rasio ini menunjukkan ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun pustu yang mampu melayani penduduk dalam satu satuan pemukiman. Dari sisi ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memadai, rata-rata setiap desa sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa pustu ataupun polindes. Selain itu, Dari sisi ketersediaan puskesmas, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, dan Bontosikuyu. Sekalipun demikian, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari banyak pulau, menyebabkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan berbeda-beda, karena belum semua pulau terdapat fasilitas kesehatan.

Tabel Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2	Pasilambena	5	5	5	5	5
3	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4	Taka Bonerate	9	9	9	9	10
5	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	7
6	Bontosikuyu	13	13	13	13	13
7	Bontoharu	9	9	9	9	10

8	Benteng	2	3	3	3	4
9	Bontomanai	12	12	12	13	13
10	Bontomatene	10	10	10	10	10
11	Buki	6	6	6	6	6
Jumlah		87	88	88	89	93
Rasio Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar		0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

h. Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2020, baru 1 buah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Haiyung untuk melayani . Pembangunan rumah sakit pratama di Pulau Jampea pada tahun 2018, hingga kini belum dapat dioperasikan karena kelengkapan alat, obat, dan tenaga kesehatan yang belum memadai. Adapun Rasio Rumah Sakit selama periode 2016 – 2021, di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rasio Rumah Sakit Per Satuan penduduk

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah <i>Rumah Sakit</i> (buah)	1	1	1	1	2
2	Jumlah Penduduk	131 605	133 003	134 280	135 642	137 071
3	Rasio <i>Rumah Sakit</i> per100 rb Penduduk	1 : 1,32	1 : 1,33	1 : 1,34	1 : 1,35	2 ; 1,37

i. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Ketersediaan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari memadai, apalagi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Adapun Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Rasio Dokter Per satuan Penduduk di kabupaten kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,238	0,135	0,112	0,108	0,109
---	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Selama periode 2016-2021, terjadi penurunan rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain karena pertambahan jumlah penduduk, beberapa faktor terjadinya penurunan rasio dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain, yaitu :

- a. Habis masa tugas. Sejumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokter dengan status Dokter Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga dokter yang bersangkutan, segera meninggalkan daerah setelah masa tugas mereka sesuai kontrak telah berakhir;
- b. Pindah Ikut Suami/Isteri. Terdapat juga kasus, dimana dokter yang dulunya terangkat pertama kalinya sebagai Dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun setelah diangkat dan bertugas, kemudian bermohon pindah dengan alasan ikut suami atau ingin dekat dengan keluarga.

Sesungguhnya, sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter antara lain melakukan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam hal penyediaan tenaga dokter. Selain itu, mengusulkan ke kementerian terkait untuk menempatkan tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui recruitment.

j. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per 10000 penduduk selama rentang waktu 2016-2021 berfluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk. Dinamika penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan faktor berpengaruh naik turunnya rasio tenaga medis, selain juga karena faktor ketersediaan jumlah tenaga medis itu sendiri, berikut tabel rasio Tenaga medis Per Satuan penduduk ;

Tabel Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,35	0,203	0,216	0,545	0,547
---	--	------	-------	-------	-------	-------

k. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Mampu Di Tanagani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Seperti halnya tenaga dokter, ketersediaan tenaga kebidanan di Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memadai. Belum semua desa memiliki petugas kebidanan.

Tabel Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Dapat di Tangani

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	0,768	0,745	0,726	0,717	0,616

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya cakupan komplikasi kebidanan antara lain karena ;

- a. Masih terbatasnya tenaga bidan.
- b. Distribusi tenaga bidan yang belum merata, kebanyakan tenaga bidan yang ada bertugas di kota Benteng atau di daratn pulau selayar.

1. Cakupan Pertolongan Persalinan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

Tabel Cakupan Pertolongan Persalinan

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
2	Pasilambena	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
3	Pasimasunggu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
4	Taka bonerate	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
5	Pasimasunggu Timur	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07

6	Bontosikuyu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
7	Bontoharu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
8	Benteng	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
9	Bontomanai	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
10	Bontomatene	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
11	Buki	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
Cakupan Pertolongan Persalinan		0,800	0,861	0,906	0,840	0,840

Selama periode 2016-2021, cakupan pertolongan persalinan menurut kecamatan umumnya sama setiap tahunnya, kecuali pada tingkat kabupaten, dalam tiga tahun pertama mengalami kenaikan dan tahun berikutnya turun lagi.

m. Cakupan Desa / Kelurahan UCI

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization (UCI)* desa/kelurahan. Desa/kelurahan UCI adalah Gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
2	Pasilambena	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
3	Pasimasunggu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
4	Taka bonerate	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
5	Pasimasunggu Timur	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
6	Bontosikuyu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
7	Bontoharu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
8	Benteng	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
9	Bontomanai	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
10	Bontomatene	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
11	Buki	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Wilayah ber HPL/HGB		0,142	0,181	0,181	0,181	0,259

Cakupan Desa/Kelurahan UCI dari 88 Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 68 Desa/Kelurahan (77,3%), pada tahun 2017 meningkat menjadi 81 Desa/ Kelurahan (92%), pada tahun 2018 turun kembali menjadi 78 Desa/ Kelurahan (88,6%) dan pada tahun 2019 jumlahnya sebanyak 79Desa/Kelurahan (89,8%). Tahun 2020 turun menjadi 75 Desa/Kelurahan atau sebesar 85,2 %.

n. Cakupan Balita Pneumonia

Pneumonia adalah peradangan pada kantong paru – paru baik itu di salah satu ataupun kedua rongga paru – paru. Infeksi ini kebanyakan terjadi pada bayi dan balita.

Tabel Cakupan Balita Pneumonia di Kabupaten Kep. Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,00	0,00	7,00	20,00	87,00
2	Pasilambena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
3	Pasimasunggu	0,00	18,63	54,90	42,55	5,36
4	Taka bonerate	0,00	7,00	38,78	18,37	3,70
5	Pasimasunggu Timur	0,00	6,84	42,11	12,28	1,75
6	Bontosikuyu	0,00	0,00	50,00	43,75	0,00
7	Bontoharu	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00
8	Benteng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bontomanai	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00
10	Bontomatene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Buki	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Cakupan balita pneumonia yang ditangani		0,00	3,34	18,34	13,90	13,65

o. Cakupan Penderita Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik relik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang rendah.

Tabel Cakupan Penderita Tuberkulosis di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	5	7	32	18	5
2	Pasilambena	1	1	18	15	8
3	Pasimasunggu	9	2	28	9	21
4	Taka bonerate	1	4	31	10	8

5	Pasimasunggu Timur	2	12	12	12	12
6	Bontosikuyu	7	9	17	24	11
7	Bontoharu	5	10	8	24	21
8	Benteng	5	43	62	70	40
9	Bontomanai	10	6	7	18	17
10	Bontomatene	5	7	23	17	13
11	Buki	1	4	10	5	7
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		0,800	0,768	0,409	0,487	0,475

Prevalensi TBC di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di gambarkan pada tabel di bawah ini ;

Tabel Tingkat Prevalensi TBC di Kabupaten Kep. Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	227,82	202,91	200,53	205,98	217,31
2	Pasilambena	37,46	74,23	101,85	58,47	143,76
3	Pasimasunggu	76,54	91,44	115,91	105,68	89,81
4	Taka bonerate	31,47	46,99	280,09	23,28	116,76
5	Pasimasunggu Timur	46,44	59,33	73,71	65,12	52,28
6	Bontosikuyu	108,54	190,66	193,70	151,43	185,23
7	Bontoharu	54,03	75,42	93,90	192,16	200,15
8	Benteng	7,24	29,32	57,05	50,14	22,25
9	Bontomanai	13,34	52,62	123,64	25,66	99,94
10	Bontomatene	26,68	172,99	176,17	118,78	139,84
11	Buki	15,67	62,39	74,60	15,47	103,83
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		77,50	103,01	124,69	103,23	129,15

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan total angka kematian sekitar 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Berikut tingkat kematian karena TB di kabupaten Kepulauan Selayar kami sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini ;

Tabel Tingkat Kematian Penduduk akibat TBC di Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,00	0,00	3,77	1,82	3,70
2	Pasilambena	0,00	0,00	9,09	0,00	14,29
3	Pasimasunggu	0,00	16,67	13,33	14,29	33,33
4	Taka bonerate	50,00	0,00	5,56	33,33	12,50
5	Pasimasunggu Timur	14,29	0,00	18,18	0,00	0,00
6	Bontosikuyu	0,00	6,25	6,25	0,00	12,50
7	Bontoharu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Benteng	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00

9	Bontomanai	100,00	0,00	11,11	0,00	0,00
10	Bontomatene	0,00	0,00	7,14	11,11	9,09
11	Buki	0,00	0,00	20,00	0,00	28,57
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		3,92	2,19	8,02	4,29	10,73

p. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk, gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia, parasit tersebut bernama Plasmodium yang hidup dan berkembang dalam tubuh nyamuk Anopheles.

Angka kejadian malaria di kabupaten kepulauan selayar dalam rentang waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan, terkecuali di tahun 2017 mengalami pelonjakan, berikut angka kejadian Malaria dalam 5 tahun terakhir ;

Tabel Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Kep.Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasimarannu	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pasilambena	0,15	0,00	0,00	0,07	0,00
3	Pasimasunggu	0,15	0,00	0,31	0,30	0,07
4	Taka bonerate	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
5	Pasimasunggu Timur	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
6	Bontosikuyu	0,12	0,60	1,33	0,23	0,12
7	Bontoharu	0,54	1,94	0,47	0,00	0,57
8	Benteng	0,00	0,15	0,33	0,07	0,07
9	Bontomanai	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bontomatene	0,67	0,80	0,38	0,13	0,13
11	Buki	0,47	0,16	0,15	0,00	0,00
Angka kejadian Malaria		0,17	0,24	0,23	0,07	0,08

q. COVID 19

Penyakit virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang tertular COVID 19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Konfirmasi aktif pada Tahun 2020 sebanyak 297 jiwa Positif COVID di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan angka kesembuhan sebesar 91,6% atau 272 jiwa, sedangkan angka kematian karena COVID adalah 2,4% atau 7 jiwa.

Tabel Kasus Kejadian Covid Di Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2020

No	Kasus Terkonfirmasi	Jumlah Penderita (Jiwa)
1.	Suspek	1980 jiwa
2.	Positif	297 jiwa
3.	Sembuh	272 jiwa
4.	Meninggal	7 jiwa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan atas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas perbantuan. Agar tugas tersebut dapat terselenggara maka dinas kesehatan berfungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan olahraga, kesehatan masyarakat serta sumber daya kesehatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, identifikasi permasalahan ada di empat aspek, antara lain;

1. Aspek Pelayanan Kesehatan
2. Kesehatan Masyarakat
3. Sumber daya kesehatan
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit

Pada aspek pelayanan kesehatan masalah mendasar ialah pelayanan kesehatan yang belum optimal. Akses pelayanan kesehatan ke puskesmas belum memadai terutama di daerah kecamatan kepulauan. Kendala yang di hadapi ialah sulitnya medan dan kondisi wilayah yang masih terpencil, sehingga hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan.

Pada aspek Kesehatan Masyarakat, permasalahan mendasara ialah belum optimalnya implementasi pendekatan pelayanan siklus kehidupan (Continuum of care) yakni upaya pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga Lansia. Kekurangan gizi dan masalah Stunting adalah masalah yang sangat mengemuka di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini.

Pada aspek sumber daya kesehatan, permasalahann utama adalah kualitas sumber daya manusia kesehatan yang belum optimal serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Pada daerah tertentu di fasilitas pelayanan kesehatanmasih banyak ditemukan kendala antara lain kekurangan dokter, tenaga perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Demikian halnya dengan kualitas tenaga kesehatan yang perlu terus di tingkatkandemi menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan memuaskan masyarakat.

Pencegahan dan pengendalian penyakit terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, masih tingginya kasus penyakit menular seperti HIV, dan TB di Selayar serta tingginya angka penderita Hipertensi dan Diabetes Melitu terutama di daerah kepulauan. Bahkan saat ini jauh lebih berat lagi dengan mewabahnya pandemic COVID -19 yang sangat memberikan dampak besar tidak hanya di sector kesehatan, akan tetapi juga berdampak pada seluruh sector kehidupan, perekonomian, pariwisata, perdagangan, perhubungan dan berbagai sector lainnya.

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. . Kementerian Kesehatan RI yang diberikan tugas oleh Negara sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kesehatan, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pembantu Bupati yang ditunjuk sebagai pelaksana otonomi daerah dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar oleh sebab itu dituntut untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis di bidang kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau secara aksesibilitas dan berkualitas.

Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai unit pelayanan teknis yakni 16 Puskesmas dan 1 buah Gudang Farmasi. Dari 16 buah Puskesmas yang ada, membawahi 71 Puskesmas Pembantu, dan 35 Poskesdes. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melaksanakan empat kegiatan utama yakni upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan kesehatan (preventif), upaya pengobatan (kuratif) dan upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Dengan kompleksitas tugas tersebut maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sumber daya tenaga kesehatan melalui pendidikan formal atau pelatihan-pelatihan teknis kesehatan sehingga tenaga kesehatan dapat mengatasi permasalahan kesehatan di masyarakat. Di samping itu dibutuhkan sarana penunjang berupa peralatan medis dan non medis seperti anggaran yang memadai dan kendaraan yang akan mendukung kegiatan operasional baik di dalam gedung maupun di luar gedung Puskesmas dan jaringannya.

Dalam upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan maka Dinas Kesehatan akan tetap memprogramkan pembangunan sarana

kesehatan berupa pembangunan Puskesmas, peningkatan status Puskesmas dari Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap. Pembangunan Puskesmas Pembantu, Pembangunan Poskesdes, Polindes dan pengadaan peralatan kesehatan (medis). Diharapkan kedepan, setiap kecamatan terdapat 1 Puskesmas Rawat Inap sebagai pusat rujukan dari Pustu dan Poskesdes atau Polindes, dan setiap desa ada Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poskesdes, serta Rumah Sakit Pratama di Kepulauan sebagai pusat rujukan untuk Puskesmas Kepulauan.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yakni “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur” dan Dinas Kesehatan berkontribusi pada Misi ke tiga yaitu; “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Terkait dengan Visi dan Misi tersebut, Dinas kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah beserta UPT Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menghadirkan sector kesehatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter sehingga terwujud kepuasan masyarakat terhadap pembangunan sector kesehatan sebagai pengejawantahan hadirnya Negara pada kehidupan setiap penduduk, sebab semakin tinggi derajat kesehatan suatu wilayah maka akan semakin tinggi usia harapan hidup setiap penduduk di wilayah tersebut dan semakin tinggi angka harapan hidup akan semakin berkualitas dan sejahtera kehidupan di wilayah tersebut.

III.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden Yakni ; “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) Misi Presiden 2020 – 2024, yakni ;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan Yang Merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden tahun 2020 – 2024 sebagai berikut ;

- Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- Menurunkan Angka Stunting Pada Balita
- Memperbaiki Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
- Meningkatkan Kemandirian dan Penggunaan Produk Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan guna mewujudkan Misi Presiden dan Bidang Kesehatan adalah;

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kegawat daruratan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan sumber daya kesehatan.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya window opportunity dimana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada usia non produktif.

2. Disparitas Status Kesehatan antar wilayah

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat social ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan – pedesaan masih cukup tinggi.

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan kesehatan atau supply side dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan.

4. Pembagian urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal

Menurut Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Urusan kesehatan merupakan juga menjadi salah satu dari 6 konkuren yang bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar.

5. Pembangunan Kesehatan dengan Pendekatan Keluarga

Penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS_PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitative dasar.

6. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025, kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemantapan pelaksanaan birokrasi.

III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Menganalisis permasalahan yang terjadi, dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut;

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pencegahan dan pengendalian pandemic kesehatan
4. Pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Penurunan angka kematian ibu, Angka kematian bayi dan Prevalensi Balita Stunting
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Era Revolusi Industri 4.0 (Era Digital/ Teknologi Informasi)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” dan Meningkatkan” **Usia Harapa Hidup**” sebagai indikatornya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Starategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Upaya kesehatan meliputi ;

1. Kesehatan Ibu dan Anak
2. Gizi Masyarakat
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
5. Survailans penyakit berbasis laboratorium
6. Pelayanan Kesehatan Primer, sekunder, dan tersier
7. Sumber daya manusia kesehatan
8. Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi system informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan
9. Pembiayaan kesehatan
10. Sediaan farmasi dan alat kesehatan
11. Pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat
12. Factor resiko kesehatan lingkungan

Target capaian Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2020 adalah 68,46 tahun naik sekitar 0,12 tahun dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi Usia Harapan Hidup di suatu wilayah maka akan semakin meningkat pula derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

IV.2. Sasaran

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

Dinas Kesehatan memiliki 6 (enam) sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Sasaran 1 Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB), dengan indikator sasaran :

- Angka Kematian Ibu dari 324,2 per 100.000 KH pada tahun 2020 menjadi 150 per 100.000 KH pada tahun 2026
- Angka Kematian Bayi dari 3,7 per 1.000 KH pada tahun 2020 menjadi 2 per 1000 KH pada tahun 2026.

Sasaran 2 Meningkatnya status gizi Balita, dengan indikator sasaran :

- Prevalensi balita gizi kurang dari 4,5 pada tahun 2020 menjadi 2,0 pada tahun 2026.
- Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus) dari 0,9 pada tahun 2020 menjadi 0,5 pada tahun 2026.

Sasaran 3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dengan indikator sasaran :

- Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (succes rate) mencapai 90%
- Persentase UCI Desa dari 75 desa (85%) pada tahun 2020 menjadi 88 desa (100%) pada tahun 2026

Sasaran 4 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator sasaran :

- Persentase pelayanan hipertensi (HT) mencapai 100% setiap tahunnya

Sasaran 5 Meningkatnya PHBS Rumah Tangga, dengan indikator :

- o Persentase Rumah Tangga berPHBS dari 60% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2026.

Sasaran 6 Meningkatkan kinerja aparatur kualitas manajemen pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :

- o Indeks Kepuasan Masyarakat dari 0,7750 pada tahun 2020 menjadi 3 pada tahun 2026.

Tabel 4.1 Tujuan, sasaran,Indikator dan Penjelasan Indikator Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan Indikator
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka harapan hidup di tahun akhir RPJMD
		Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	Jumlah seluruh kematian ibu terhadap seluruh kelahiran hidup per 100.000
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah seluruh kematian bayi terhadap seluruh kelahiran hidup per 1.000
	Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi balita gizi kurang	%	Jumlah balita(0-59 bln) dengan kategori status gizi kurang (BB/TB <- 3SD) terhadap seluruh Jumlah balita (0-59 bln) yang Ditimbang
		Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)	%	Jumlah balita(0-59 bln) dengan kategori status gizi sangat kurus (BB/TB <- 3SD) terhadap seluruh Jumlah balita (0-59 bln) yang ditimbang

	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (success rate)	%	Jumlah pasien TB yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) terhadap seluruh pasien TB
		Persentase UCI Desa	%	Jumlah seluruh desa UCI terhadap seluruh desa
	Meningkatnya pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	Persentase pelayanan hipertensi (HT)	%	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap seluruh estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun
	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	%	Jumlah rumah tangga yang berPHBS terhadap jumlah rumah tangga di data/dipantau
	Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	Hasil perhitungan terhadap parameter IKM

Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	68,46	68,52	68,54	68,56	68,58
	1. Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	190/100.000 KH	180/100.000 KH	170/100.000 KH	160/100.000 KH	150/100.000 KH
		Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	4,4/1000 KH	4,3/1000 KH	4,2/1000 KH	4,1/1000 KH	4/1000 KH
	2. Meningkatkan Status Gizi Balita	Prevalensi balita gizi kurang	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
		Persentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%
	3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua tipe (succes rate)	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase UCI Desa	85%	90%	95%	90%	100%

	4. Meningkatkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular	Persentase pelayanan hipertensi (HT)	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Meningkatkan PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga berPHBS	67%	69%	71%	73%	75%
	7. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas manajemen pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,50	2,00	2,50	3,50	3,00

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN

V.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arahan kebijakan yang ditetapkan dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, opportunity, dan threat).

Gambar V-1. Analisis Swot

ANALISIS SWOT		
Faktor Eksternal	Peluang (O) - <ol style="list-style-type: none"> Regulasi yang mendukung Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan Koordinasi antara Instansi baik Pusat, daerah dan stakeholder 	Tantangan (T): <ol style="list-style-type: none"> Pandemik Kesehatan Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kesehatan (PHBS) Jumlah Penduduk yang besar Perubahan Nilai Sasiokultural Masyarakat (perubahan needs dan kepuasan masy terhadap pelayanan kesehatan, era "global digital brain, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masy) Perubahan strati demografi ke umur tua Perubahan sistem kesehatan
Faktor Internal	Kekuatan (S) <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi memadai, Terdapatnya jumlah tenaga dan kualitas yang memadai, Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja pelayanan rata-rata mencapai target yang ditetapkan 	Alternatif Strategi (S-O): <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Kekuatan (S) <ol style="list-style-type: none"> Struktur Organisasi memadai, Terdapatnya jumlah tenaga dan kualitas yang memadai, Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja pelayanan rata-rata mencapai target yang ditetapkan 	Alternatif Strategi (S-T): <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular (pandemik kesehatan) Peningkatan upaya promotif dan preventif Peningkatan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP dan UKM)
	Kelurahan (W): <ol style="list-style-type: none"> Tata Kelola organisasi belum optimal Distribusi tenaga yang belum merata Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, 	Kelurahan (W-O): <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Tata Kelola Organisasi Pemerataan distribusi tenaga kesehatan, Optimalisasi Fungsi Pengelolaan Aset Daerah,
	Kelurahan (W): <ol style="list-style-type: none"> Tata Kelola organisasi belum optimal Distribusi tenaga yang belum merata Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah, 	Alternatif Strategi (W-T): <ol style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kualitas SDM Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan

V.2. Arah Kebijakan

Tabel V-1. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan

Visi : “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur”				
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Misi 3 : “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan serta pengendalian penyakit	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kualitas SDM Kesehatan serta Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan

			Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
--	--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

VI.1. Rencana Program

a. Rencana Program Dinas Kesehatan

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah;

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Program Sediaan Farmasi, alata Kesehatan, dan Makanan dan Minuman.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

b. Rencana Program RSUD K.H Hayyung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

VI.2. Kegiatan

a. Kegiatan Dinas Kesehatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 1. Perencanaan Dan Evaluasi Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 4. Penataan Organisasi
 5. Adminstrasi umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang administrasi Perkantoran
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 9. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada OPD Perangkat Daerah.

- Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah.
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten / Kota.
 3. Penertiban izin Rumah Sakit Kelas C,D.dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten /Kota.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota.
- Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makan Minum
 1. Pemberiaan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal mikroobat tradisional.
- Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 1. Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten.

b. Kegiatan RS K.H Hayyung

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 1. Administarasi keuangan perangkat daerah
 2. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 5. Peningkatan Pelayanan BLUD
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
 2. Penyediaan layanan kesehatan rujukan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat pertama.

3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN

VII.1. Dinas Kesehatan

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Kesehatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026.

VII.2. RSUD K.H Hayyung

Uraian indikator – indikator kinerja dari RS K.H Hayyung telah mengacu pada tujuan sasaran RPJMD

Tabel VII-1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan																			
			1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan laporan capaian Keuangan		100	52.338.995.303	100	53.055.516.149	100	54.383.495.718	100	55.688.155.780	100	57.016.875.177	100	57.016.875.177	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		1	a Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah		100	672.116.155	100	716.960.510	100	864.513.795	100	1.009.476.024	100	1.157.111.512	100	1.157.111.512	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana kerja tahun OPD (Renja pokok dan rena perubahan)		100	236.645.859	100	244.119.918	100	268.712.132	100	292.872.503	100	317.478.417	100	317.478.417	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat daerah		100	32.474.059	100	39.948.118	100	64.540.332	100	88.700.703	100	113.306.617	100	113.306.617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan perangkat daerah		100	32.474.059	100	39.948.118	100	64.540.332	100	88.700.703	100	113.306.617	100	113.306.617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Popok dan Perubahan		100	32.474.059	100	39.948.118	100	64.540.332	100	88.700.703	100	113.306.617	100	113.306.617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			5 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Profil Dinkes dan Puskesmas dan SPM		100	305.574.059	100	313.048.118	100	337.640.332	100	361.800.703	100	386.406.617	100	386.406.617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Capaian Laporan Kinerja		100	32.474.059	100	39.948.118	100	64.540.332	100	88.700.703	100	113.306.617	100	113.306.617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		2	b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	36.716.113.427	100	36.795.726.854	100	36.943.280.139	100	37.088.242.368	100	37.235.877.856	100		Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji PNS		100	36.491.451.678	100	36.501.403.356	100	36.519.847.516	100	36.537.967.794	100	36.556.422.230	100	36.556.422.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			8 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi		100	109.951.678	100	119.903.356	100	138.347.516	100	156.467.794	100	174.922.230	100	174.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			9 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	terlaksananya perjurnalan keuangan		100	19.951.678	100	29.903.356	100	48.347.516	100	66.467.794	100	84.922.230	100	84.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			10	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan		100	14.951.678	100	24.903.356	100	43.347.516	100	61.467.794	100	79.922.230	100	79.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			11	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semester	terpantaunya pelaporan keuangan baik perbulan maupun persemester		100	24.951.678	100	34.903.356	100	53.347.516	100	71.467.794	100	89.922.230	100	89.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			12	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlapornya Realisasi Aanggaran		100	17.951.678	100	27.903.356	100	46.347.516	100	64.467.794	100	82.922.230	100	82.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Aset dan Laporan Keuangan yang disusun		100	19.951.678	100	29.903.356	100	48.347.516	100	66.467.794	100	84.922.230	100	84.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			14	Penyusunan lakip	Tersedianya Dokumen lakip		100	16.951.678	100	26.903.356	100	45.347.516	100	63.467.794	100	81.922.230	100	81.922.230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		3	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah aparatur yang ditingkatkan kinerja dan profesionalismenya		100	506.113.427		585.726.854		733.280.139		878.242.368		1.025.877.856		1.025.877.856	Dinkes	x
			15	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersedianya data administrasi kepegawaian		100	348.037.809		374.575.618		423.760.046		472.080.789		521.292.618		521.292.618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			16	Monitoring dan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya monitoring dan penilaian kinerja pegawai		100	61.537.809		88.075.618		137.260.046		185.580.789		234.792.618		234.792.618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			17	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan		100	96.537.809		123.075.618		172.260.046		268.901.532		318.113.361		318.113.361	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
f		4	d	Penataan Organisasi	Terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja OPD		100	224.613.427		304.226.854		451.780.139		596.742.368		744.377.856		744.377.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian bagi tenaga kesehatan di 14 UPTD Puskesmas	Terlaksananya kegiatan Monev di 14 UPTD Puskesmas		100	224.613.427		304.226.854		451.780.139		596.742.368		744.377.856		744.377.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		5	e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	100	1.498.228.028	100	1.577.841.455	100	1.725.394.740	100	1.870.356.969	100	2.017.992.457	100	2.017.992.457	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan untuk Gedung Kantor Dinkes dan Rs Pratama	100	100	470.402.904	100	483.671.808	100	508.264.022	100	532.424.393	100	557.030.304	100	557.030.304	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan dinkes.gudang farmasi dan Rs Pratama	100	100	48.468.905	100	61.737.809	100	86.330.023	100	110.490.394	100	135.096.305	100	135.096.305	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bacaan dan perundang – undangan	1-00	100	42.968.904	100	56.237.800	100	80.830.014	100	104.990.412	100	129.596.323	100	129.596.323	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			22	Penyediaan Bahan /Material	tersedianya bahan peralatan kantor	100	100	25.868.904	100	39.137.808	100	63.730.022	100	87.890.393	100	112.496.304	100	112.496.304	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

																			Selayar	
			23	Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makan minum tamu		100	23.268.904	100	36.537.808	100	61.130.022	100	85.290.393	100	134.502.215	100	134.502.215	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	887.249.504	100	900.518.408	100	925.110.622	100	949.270.993	100	973.876.904	100	973.876.904	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		6	f	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	139.013.427	100	218.626.854	100	366.180.139	100	511.142.368	100	658.777.856	100	658.777.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			25	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya tempat parkir dinkes		100	139.013.427	100	218.626.854	100	366.180.139	100	511.142.368	100	658.777.856	100	658.777.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		7	g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang peunjang urusan pemerintah daerah		100	11.590.951.427	100	11.670.564.854	100	11.819.118.139	100	11.964.080.368	100	12.111.715.856	100	12.111.715.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			26	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		100	663.754.713	100	703.561.426	100	777.838.068	100	850.319.182	100	924.136.926	100	924.136.926	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase penunjang Administrasi perkantoran		100	10.927.196.713	100	10.967.003.426	100	11.041.280.068	100	11.113.761.182	100	11.187.578.926	100	11.187.578.926	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		8	h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	923.787.127	100	1.003.400.554	100	1.150.953.839	100	1.295.916.068	100	1.443.551.556	100	1.443.551.556	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya mobil jabatan,mobil & motor dinkes dan puskesmas		100	484.145.805	100	510.683.614	100	559.868.042	100	608.188.785	100	657.400.614	100	657.400.614	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			29	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		100	359.223.509	100	385.761.318	100	434.945.746	100	483.266.489	100	532.478.318	100	532.478.318	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			30	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (ac ,laptop dan printer)		100	80.417.809	100	106.955.618	100	156.140.046	100	204.460.789	100	253.672.618	100	253.672.618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		9	i	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daeah pada perangkat daerah		100	353.211.427	100	432.824.854	100	580.378.139	100	725.340.368	100	772.975.856	100	772.975.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			31	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan barang milik daerah		100	353.211.427	100	432.824.854	100	580.378.139	100	725.340.368	100	772.975.856	100	772.975.856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya layanan pada 12 indikator SPM		100	110.230.872.000	100	111.639.932.638	100	99.436.783.152	100	117.184.520.579	100	119.982.929.240	100	119.982.929.240	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

		10	j	Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKM kewenangan daerah yang dilaksanakan	100	24.436.142.582	100	24.905.829.461	100	24.901.761.745	100	30.817.674.220	100	31.750.477.107	100	31.750.477.107	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			32	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Persentase rumah dinas untuk tenaga kesehatan	100	134.098.125	100	201.196.250	100	200.615.148	100	1.045.745.501	100	1.179.003.056	100	1.179.003.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			33	Pengembangan Puskesmas	Persentase pengembangan Puskesmas	100	257.098.125	100	324.196.250	100	323.615.148	100	1.168.745.501	100	1.302.003.056	100	1.302.003.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Ramah Anak pada) Puskesmas	Persentase pengadaan ramah anak di puskesmas	100	112.366.041	100	112.388.407	100	112.194.707	100	393.904.824	100	438.324.009	100	438.324.009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan Inspeksi Sarana dan Surveillance Produk dan Pengendalian Perizinan	Persentase peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana dan survillans produk pengendalian perizinan	100	72.366.041	100	72.388.407	100	72.194.707	100	353.904.824	100	398.324.009	100	398.324.009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Pembekalan CDAKB untuk Pengelola Program di Puskesmas	Persentase peretemuan pembekalan untuk pengelola kegiatan di PKM	100	72.366.041	100	72.388.407	100	72.194.707	100	353.904.824	100	398.324.009	100	398.324.009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			34	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase regabilitasi dan pemeliharaan PKM	100	1.042.098.125	100	1.109.196.250	100	1.108.615.148	100	1.953.745.501	100	2.087.003.056	100	2.087.003.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			35	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pembangunan sarana kesehatan lainnya	100	1.217.098.125	100	1.284.196.250	100	1.283.615.148	100	2.128.745.501	100	2.262.003.056	100	2.262.003.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				pengadaan mobil untuk PKM dan jaringannya	Persentase pengadaan mobilir untuk PKM dan jarinagnnya	100	216.774.531	100	233.549.062	100	233.403.787	100	444.686.375	100	478.000.763	100	478.000.763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				pembangunan ruangan untuk dokumen / arsp Dinas Kesehatan	Persentase pembangunan ruangan untuk dokemn dan arsip Dinkes	100	266.774.531	100	283.549.062	100	283.403.787	100	494.686.375	100	528.000.763	100	528.000.763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			36	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pengadaan alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	100	2.327.098.125	100	2.394.196.250	100	2.393.615.148	100	32.387.455.501	100	32.520.713.056	100	32.520.713.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Alkes untuk Puskesmas Pustu dan Jaringannya	Persentase pengadaan Alkes untuk PKM dan Pustu dan jaringannya	100	2.013.419.625	100	2.026.839.250	100	2.026.723.030	100	8.025.491.100	100	8.052.142.611	100	8.052.142.611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Studi Banding Program Alkes dan PKRT	Persentase study banding program ALKES dan PKRT	100	113.419.625	100	126.839.250	100	126.723.030	100	6.125.491.100	100	6.152.142.611	100	6.152.142.611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi Program Alkes dan PKRT	Persentase konsultasi program Alkes dan PKRT	100	33.419.625	100	46.839.250	100	46.723.030	100	6.045.491.100	100	6.072.142.611	100	6.072.142.611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Monev Program Alkes dan PKRT	Persentase perjalanan dinas program ALkes dan PKRT	100	53.419.625	100	66.839.250	100	66.723.030	100	6.065.491.100	100	6.092.142.611	100	6.092.142.611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Alkes di Puskesmas dan Pustu	Persentase monitoring dan evaluasi pengelola alkes di PKM dan Pustu	100	113.419.625	10	126.839.250	100	126.723.030	100	6.125.491.100	100	6.152.142.661	100	6.152.142.661	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			37	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase pengadaan alat dan kalibrasi	100	217.098.125	100	284.196.250	100	283.615.148	100	1.137.745.501	100	1.271.003.056	100	1.271.003.056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Kalibrasi Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas	Persentase kalibrasi alat kesehatan di PKM	100	166.774.531	100	183.549.062	100	183.403.787	100	396.936.375	100	430.250.763	100	430.250.763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Obat dan Vaksin	Persentase pengadaan obat dan vaksin	100	1.333.749.156	100	1.350.523.687	100	1.350.378.412	100	1.563.911.000	100	1.597.225.388	100	1.597.225.388	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				pengadaan bahan habis pakai	Persentase pengadaan bahan habis pakai	100	1.577.296.531	100	1.594.071.062	100	1.593.925.787	100	1.807.458.375	100	1.840.772.763	100	1.840.772.763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase pemeliharaan fasyankes	100	516.774.531	100	533.549.062	100	533.403.788	100	746.936.376	100	798.250.764	100	798.250.764	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			38	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase pengembangan Rumah sakit	100	10.067.098.125	100	10.134.196.250	100	10.133.615.148	100	10.978.745.503	100	11.112.003.058	100	11.112.003.058	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		11	k	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM DAN Rujukan tingkat daerah kabupaten /Kota	Persentase penyediaan layanan UKM dan Rujukan tingkat daerah	100	73.510.124.379	100	73.979.811.258	100	69.912.094.763	100	75.828.007.238	100	76.760.810.125	100	76.760.810.125	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase pengelolaan kesehatan gizi masyarakat	100	191.682.929	100	221.038.358	100	33.193.922	100	402.938.451	100	461.238.631	100	461.238.631	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100	195.490.429	100	224.845.858	100	29.386.422	100	399.130.951	100	457.431.131	100	457.431.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	164.005.429	100	193.360.858	100	60.871.422	100	430.615.951	100	488.916.131	100	488.916.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Audit Maternal Perinatal (AMP)	Persentase audit maternal perinatal	100	35.038.857	100	42.377.714	100	9.255.355	100	101.691.487	100	198.497.648	100	198.497.648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan penanganan dasar komplikasi maternal perinatal	Persentase pertemuan penanganan dasar komplikasi maternal perinatal	100	32.588.857	100	39.927.714	100	6.805.355	100	99.238.487	100	196.044.648	100	196.044.648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas pada Manajemen Terpadu balita sakit (MTBS)	Persentase pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas pada Manajemen Terpadu balita sakit (MTBS)	100	53.838.857	100	61.17.7714	100	28.055.355	100	120.491.487	100	217.297.648	100	217.297.648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Evaluasi pelaksanaan penjarangan anak Sekolah	Persentase evaluasi pelaksanaan penjarangan anak usia sekolah	100	42.538.857	100	49.877.714	100	16.755.355	100	109.191.487	100	205.997.648	100	205.997.648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Persentase pengelolaan kesehatan ibu bersalin	100	102.090.429	100	131.445.858	100	122.786.422	100	492.530.951	100	550.831.131	100	550.831.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monitoring dan evaluasi program KIA/KB	Persentase monitoring dan evaluasi program KIA	100	102.090.429	100	131.445.858	100	122.786.422	100	492.530.951	100	550.831.131	100	550.831.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	100	110.645.429	100	140.000.858	100	114.231.422	100	483.975.951	100	542.276.131	100	542.276.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	107.005.429	100	136.360.858	100	117.871.422	100	487.615.951	100	545.916.131	100	545.916.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Ketuk Pintu Program P2 TBC	Persentase ketuk pintu program P2 TB	100	52.327.714	100	69.355.428	100	60.110.710	100	244.982.974	100	274.133.064	100	274.133.064	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan pencatatan dan pelaporan SITB	Persentase latihan pencatatan dan pelaporan SITB	100	54.677.714	100	124.033.142	100	114.788.424	100	299.660.688	100	328.810.778	100	328.810.778	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			45	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Persentase pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	99.355.429	100	128.710.858	100	125.521.422	100	495.265.951	100	553.566.131	100	553.566.131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persentase engelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	100	834.355.429	100	863.710.858	100	609.478.578	100	979.223.107	100	1.037.523.287	100	1.037.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Alat, Bahan/Reagen Lab. Pemeriksaan Air dan makanan	Persentase pengadaan Alat, Bahan/Reagen Lab. Pemeriksaan Air dan makanan	100	102.096.816	100	104.193.632	100	86.034.184	100	112.444.507	100	116.608.805	100	116.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Dokumen Penyehatan Lingkungan Sehat (DPLH)	Persentase penyusunan Dokumen Penyehatan Lingkungan Sehat (DPLH)	100	102.096.816	100	104.193.632	100	86.034.184	100	112.444.507	100	116.608.805	100	116.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan makanan (TPM)	Persentase pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	100	102.096.816	100	104.193.632	100	86.034.184	100	112.444.507	100	116.608.805	100	116.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pengawasan Damiu	Persentase pembinaan dan Pengawasan Damiu	100	52.096.816	100	54.193.932	100	36.034.184	100	62.444.507	100	66.608.805	100	66.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengelolaan Sampah Medis	Persentase pengelolaan Sampah Medis	100	102.096.816	100	104.193.632	100	86.034.184	100	112.444.507	100	116.608.805	100	116.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum	100	52.096.816	100	54.193.932	100	36.034.184	100	62.444.507	100	66.608.805	100	66.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Bimtek pengelola program kesehatan kerja di puskesmas	Persebtase Bimtek pengelola program kesehatan kerja di puskesmas	100	12.096.816	100	14.193.632	100	3.965.816	100	30.376.139	100	34.540.437	100	34.540.437	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF	Persentase Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF	100	57.096.816	100	59.193.632	100	41.034.184	100	67.444.507	100	71.608.805	100	71.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Supervisi Program Penyehat Lingkungan	Persentase Supervisi Program Penyehat Lingkungan	100	62.096.816	100	64.193.632	100	46.034.184	100	72.444.507	100	76.608.805	100	76.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi teknis ke provensi	Persentase Konsultasi teknis ke provensi	100	22.096.816	100	24.193.632	100	6.034.184	100	32.444.507	100	36.608.805	100	36.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				sistem managemen K3 di Sektor Formal	Persentase sistem managemen K3 di Sektor Formal	100	42.096.816	100	44.193.632	100	26.034.184	100	52.444.507	100	56.608.805	100	56.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Prog.UKK	Persentase Monev Prog.UKK	100	22.096.816	100	24.193.632	100	6.034.184	100	32.444.507	100	36.608.805	100	36.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Reagen untuk pemeriksaan fisik pekerja formal dan informal	Persentase Pengadaan Reagen untuk pemeriksaan fisik pekerja formal dan informal	100	52.096.816	100	54.193.932	100	36.034.184	100	62.444.507	100	66.608.805	100	66.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				pembinaan dan pemeriksaan kebugaraan calon jemaah haji dan ASN	Persentase pembinaan dan pemeriksaan kebugaraan calon jemaah haji dan ASN	100	52.096.816	100	54.193.932	100	36.034.184	100	62.444.507	100	66.608.805	100	66.608.805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			47	Pelayanan Kesehatan tradisional ,Akupuntur ,Asuhan mandiri ,dan tradisional lainnya	Persentase pelayanan Kesehatan tradisional ,Akupuntur ,Asuhan mandiri ,dan tradisional lainnya	100	344.355.429	100	373.710.858	100	119.478.578	100	489.223.107	100	547.523.287	100	547.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Program Yankestrand di Provinsi	Persentase program Yankestrand di Provinsi	100	344.355.429		373.710.858		119.478.578		489.223.107		547.523.287		547.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			48	Pengelolaan Surveilns Kesehatan	Persentase Pengelolaan Surveilns Kesehatan	100	1.229.355.429	100	1.258.710.858	100	1.004.478.578	100	1.374.223.107	100	1.432.523.287	100	1.432.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Data Surveilans	Persentase Monev Data Surveilans	100	452.258.109	100	454.516.218	100	434.959.889	100	463.401.774	100	569.111.243	100	569.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	100	52.258.109	100	54.516.218	100	34.959.889	100	63.401.774	100	169.111.243	100	169.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	100	52.258.109	100	54.516.218	100	34.959.889	100	63.401.774	100	169.111.243	100	169.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi (Rutin dan Covid-19)	Persentase pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi (Rutin dan Covid-19)	100	102.258.109	100	104.516.218	100	84.959.889	100	113.401.775	100	219.111.244	100	219.111.244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemantauan Kualitas Vaksin	Persentase Pemantauan Kualitas Vaksin	100	52.258.109	100	54.516.218	100	34.959.889	100	63.401.774	100	169.111.243	100	169.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemantauan dan Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu dan Fasyankes	Persentase Pemantauan dan Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu dan Fasyankes	100	102.258.109	100	104.516.218	100	84.959.889	100	113.401.774	100	219.111.244	100	219.111.244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Effective Vaccine Management (EVM)	Persentase Effective Vaccine Management (EVM)	100	37.258.109	100	39.516.218	100	19.959.889	100	48.401.774	100	154.111.243	100	154.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Data Quality System (DQS)	Persentase Data Quality System (DQS)	100	32.258.109	100	34.516.218	100	14.959.889	100	43.401.774	100	149.111.243	100	149.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Focus Group Discution Strategi Komunikasi membentuk herd immunity terhadap PD3I dan Covid-19	Persentase Focus Group Discution Strategi Komunikasi membentuk herd immunity terhadap PD3I dan Covid-19	100	102.258.109	100	104.516.218	100	84.959.889	100	113.401.774	100	219.111.244	100	219.111.244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Supervisi Supportif Program Imunisasi	Persentase Supervisi Supportif Program Imunisasi	100	37.258.109	100	39.516.218	100	19.959.889	100	48.401.774	100	154.111.243	100	154.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelacakan KIPi serius dan non serius	Persentase Pelacakan KIPi serius dan non serius	100	52.258.109	100	54.516.218	100	34.959.889	100	63.401.774	100	169.111.243	100	169.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Petugas Imunisasi (Vaksinator) yang tersertifikasi	Persentase Pelatihan Petugas Imunisasi (Vaksinator) yang tersertifikasi	100	102.258.109	100	104.516.218	100	84.516.218	100	113.401.774	100	219.111.244	100	219.111.244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pertemuan Lintas Sektor (Advokasi) Peningkatan Cakupan Imunisasi Tingkat Kabupaten	Persentase Pertemuan Lintas Sektor (Advokasi) Peningkatan Cakupan Imunisasi Tingkat Kabupaten	100	52.258.109	100	54.516.218	100	34.959.889	100	63.401.774	100	169.111.243	100	169.111.243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			49	Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular	100	879.205.429	100	908.560.858	100	654.328.578	100	1.024.073.107	100	1.082.373.287	100	1.082.373.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			50	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	53.029.355.429	100	53.058.710.858	100	52.804.478.578	100	53.174.223.107	100	53.232.523.287	100	53.232.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				JKN	Persentase JKN	100	53.029.355.429	100	53.058.710.858	100	52.804.478.578	100	53.174.223.107	100	53.232.523.287	100	53.232.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			51	Re-Akreditasi Puskesmas	Persentase Re-Akreditasi Puskesmas	100	629.355.429	100	658.710.858	100	404.478.578	100	774.223.107	100	832.523.287	100	832.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			52	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	329.355.429	100	358.710.858	100	104.478.578	100	474.223.107	100	532.523.287	100	532.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			53	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas	100	14.029.355.429	100	14.058.710.858	100	13.804.478.578	100	14.174.223.107	100	14.232.523.287	100	14.232.523.287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			54	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Persentase Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	100	1.235.155.429	100	1.264.510.858	100	1.102.478.578	100	1.472.223.107	100	1.904.467.636	100	1.904.467.636	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Kaji Banding kelayakan implementasi telemedicine dan tentang PKM BLUD	Persentase Kaji Banding kelayakan implementasi telemedicine dan tentang PKM BLUD	100	88.892.571	100	93.785.142	100	66.779.762	100	128.403.850	100	200.444.604	100	200.444.604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi dan koordinasi program pelayanan kesehatan primer	Persentase Konsultasi dan koordinasi program pelayanan kesehatan primer	100	62.892.571	100	67.785.142	100	40.779.762	100	102.404.050	100	174.444..804	100	174.444..804	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Koordinasi dan monitoring evaluasi program PIS PK	Persentase koordinasi dan monitoring evaluasi program PIS PK	100	104.892.571	100	109.785.142	100	82.779.762	100	144.403.850	100	216.444.604	100	216.444.604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer	Persentase Pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer	100	48.292.571	100	53.185.142	100	26.179.762	100	87.803.850	100	159.844.604	100	159.844.604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelayanan kesehatan keliling terpadu di daerah terpencil	Persentase Pelayanan kesehatan keliling terpadu di daerah terpencil	100	304.892.571	100	309.785.141	100	282.779.761	100	627.183.610	100	699.224.364	100	699.224.364	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Operasional Posko Public Servis Center (PSC)	Persentase Operasional Posko Public Servis Center (PSC)	100	625.292.571	100	630.185.142	100	603.179.762	100	664.803.850	100	736.844.604	100	736.844.604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		12	I	Penertiban izin rumah sakit kelas c, d, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Penertiban izin rumah sakit kelas c, d, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	100	690.686.879	100	1.160.373.758	100	1.156.306.042	100	7.072.218.517	100	8.005.021.404	100	8.005.021.404	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			55	Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Rujukan Puskesmas daratan dan Kepulauan	Persentase Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Rujukan Puskesmas daratan dan Kepulauan	100	217.421.719	100	334.843.438	100	333.826.509	100	2.062.804.627	100	2.296.005.348	100	2.296.005.348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			56	Operasional Posko Public Service Center (PSC) 119 pusat layanan Terpadu dan 16 Puskesmas	Persentase Operasional Posko Public Service Center (PSC) 119 pusat 1layanan Terpadu dan 16 Puskesmas	100	189.421.719	100	306.843.438	100	305.826.509	100	2.034.804.627	100	2.268.005.348	100	2.268.005.348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			57	Konsultasi Rujukan ke Provinsi	Persentase Konsultasi Rujukan ke Provinsi	100	141.421.719	100	258.843.438	100	257.826.509	100	1.986.804.627	100	2.220.005.348	100	2.220.005.348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			58	Konsultasi Rujukan ke Kementerian Kesehatan	Persentase konsultasi Rujukan ke Kementerian Kesehatan	100	142.421.719	100	259.843.438	100	258.826.509	100	1.987.804.627	100	2.221.005.348	100	2.221.005.348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		13	m	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Persentase perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			59	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Persentase pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendidikan dan pelatihan (DikIT) Formal	Persentase pendidikan dan pelatihan (DikIT) Formal	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendidikan dan pelatihan (DikIT) Fungsional kesehatan	Persentase pendidikan dan pelatihan (DikIT) Fungsional kesehatan	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Dokumen SDMK (Profil) dan Renbut SDMK)	Persentase penyusunan Dokumen SDMK (Profil) dan Renbut SDMK)	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan dokumen analisis jabatan ,evaluasi jabatab,analisis beban kerja dan peta jabatan SDMK	Persentase penyusunan dokumen analisis jabatan ,evaluasi jabatab,analisis beban kerja dan peta jabatan SDMK	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Tim Penguji Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase pelatihan Tim Penguji Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi petugas Rekam medik	Persentase pelatihan Peningkatan Kompetensi petugas Rekam medik	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			IV	Program SEDIAAN FARMASI ,ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM	Persentase Obat dan Makanan Yang memenuhi syarat	100	485.334.000	100	491.978.222	100	504.292.437	100	516.390.413	100	528.711.488	100	528.711.488	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		14	n	Pemberian izin Apotek,tokoh ,obat ,tokoh alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek,tokoh ,obat ,tokoh alat kesehatan dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	485.334.000	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			60	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	485.334.000	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	100	491.978.222	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	Persentase pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	100	47.325.174	100	48.274.348	100	48.274.348	100	48.274.348	100	48.274.348	100	48.274.348	48.274.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Monitoring dan Evaluasi Logistik Kefarmasian dan Laporan Dukungan Kefarmasian di Setiap Apotek Puskesmas	Persentase monitoring dan Evaluasi Logistik Kefarmasian dan Laporan Dukungan Kefarmasian di Setiap Apotek Puskesmas	100	9.407.174	100	10.356.348	100	10.356.348	100	10.356.348	100	10.356.348	100	10.356.348	10.356.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Reagen Laboratorium	Persentase pengadaan Reagen Laboratorium	100	44.721.174	100	45.670.348	100	45.670.348	100	45.670.348	100	45.670.348	100	45.670.348	45.670.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Bimbingan teknis bagi pengelola sarana pelayanan kefarmasian	Persentase bimbingan teknis bagi pengelola sarana pelayanan kefarmasian	100	186.369.174	100	187.318.348	100	187.318.348	100	187.318.348	100	187.318.348	100	187.318.348	187.318.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP	Persentase pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRTP	100	111.654.174	100	112.603.348	100	112.603.348	100	112.603.348	100	112.603.348	100	112.603.348	112.603.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeriksaan post market pada produk makan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Persentase pemeriksaan post market pada produk makan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	100	72.567.174	100	73.516.348	100	73.516.348	100	73.516.348	100	73.516.348	100	73.516.348	73.516.348	Kab. Kepulauan Selayar
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Keamanan Pangan	Persentase peningkatan upaya promosi kesehatan, Advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	100	118.539.174	100	119.488.348	100	119.488.348	100	119.488.348	100	119.488.348	100	119.488.348	119.488.348	Kab. Kepulauan Selayar
			V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penurunan Masalah Kesehatan Masyarakat	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

		15	o	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase pengembangan dan pelaksanaan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			61	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	Dinkes	kab. Kepulauan Selayar
					Total		100	163.155.201.303		165.287.427.009		154.424.571.307		173.489.066.772		177.628.515.905		177.628.515.905		

Tabel VII-2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RS Hayyung Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Daerah Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Targe t	Rp	Targe t	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							RSUD K.H. Hayyung				83.730.189.0 92	-	84.876.455.3 81	-	81.400.913.0 59	-	89.088.064.9 63	-	91.213.706.1 94	-	91.213.706.1 94		
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			56.361.043.0 92	-	57.132.625.7 72	-	58.562.655.3 95	-	59.967.573.4 98	-	61.398.399.8 02	-	61.398.399.8 02		
							1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah														-	
							- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulanan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan			15.965.994.5 92		16.500.000.0 00	-	16.700.000.0 00	-	17.000.000.0 00	-	17.500.000.0 00	-	17.500.000.0 00		
							2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah aparatur yang ditingkatkan kinerja dan profesionalisme nya					-		-			-		-		-	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 merupakan rencana yang masih bersifat strategic dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan dilakukan bersama oleh Kepala Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan tim dari Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan Stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.